



Laporan Kinerja Triwulan 2 BPMP Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP Provinsi Bengkulu selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	54.56	%	0	0
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu	A	Predikat	-	-
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu	93.68	Nilai	0.50	62.05

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE



1. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKK 1.1 adalah

1. Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Bidang Pendidikan Inklusi di Provinsi Bengkulu.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi pendidikan dan pelatihan berjenjang bidang pendidikan Inklusi di Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 April 2024 melalui daring. Sasaran dari kegiatan berasal dari unsur pejabat dinas pendidikan dan kepala sekolah serta guru yang memiliki peserta didik dengan penyandang disabilitas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung target ketercapaian IKK 1.1. Guru mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusif: 2.490 tingkat dasar, 250 tingkat lanjutan, 127 tingkat mahir.

2. Webinar Optimalisasi *Chromebook* dengan tema inovasi dan kreasi kearifan lokal dalam pembelajaran pemanfaatan TIK di Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Kegiatan webinar optimalisasi *chromebook* dengan tema inovasi dan kreasi kearifan lokal dalam pembelajaran pemanfaatan TIK di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024 secara daring melalui kanal *youtube* BPMP Provinsi Bengkulu, link <https://bit.ly/3U2g3j7>. Sasaran webinar optimalisasi *chromebook* dengan tema inovasi dan kreasi kearifan lokal dalam pembelajaran pemanfaatan TIK di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah pengawas, kepala sekolah dan guru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung target ketercapaian IKK 1.1 UPT yaitu :

1. Meningkatkan aktivasi akun belajar.id dari 72,96% menjadi 100% di luar akun peserta didik PAUD dan kesetaraan;
2. Meningkatkan jumlah Satuan Pendidikan yang memanfaatkan *GWE* dengan akun belajar.id dari 83,53% menjadi 100% Satuan Pendidikan;
3. Optimalisasi Pemanfaatan TIK [*Chromebook*] dalam pembelajaran (100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK).



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE



3. Sosialisasi Sobat (SIAR).

Sosialisasi Sobat SIAR merupakan kegiatan yang digunakan untuk memberi ruang publikasi kepada sobat SIAR yang ada di Provinsi Bengkulu, Perlu diketahui bahwa Provinsi Bengkulu telah memiliki 2 orang sobat SIAR yang memiliki praktik baik dalam pemanfaatan aplikasi ARKAS untuk pengelolaan anggaran di satuan pendidikan. BPMP Provinsi Bengkulu melalui PIC 08 menginisiasi dan memberikan ruang publik melalui *zoom meeting* yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2024.

4. Advokasi AKS kepada Pemerintah Daerah dengan AKS Rendah.

Target Renstra Kemendikbudristek Tahun 2024 tentang Angka Kesiapan Sekolah (AKS) adalah 65% Kab/Kota dengan AKS PAUD >75%. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2023 menyatakan bahwa pada tahun 2023, terdapat 76,54% anak kelas 1 SD yang pernah mengikuti pendidikan prasekolah dan siap memasuki jenjang Pendidikan Dasar. Jika diperinci capaian untuk kabupaten/kota, maka terdapat 54% kab/kota di Indonesia sudah mencapai AKS PAUD >75%. Sementara masih ada 46% yang belum tercapai atau AKS PAUD \leq 75%. Capaian AKS Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

NO	Kabupaten	AKS (%)	Ketercapaian Renstra
1	Kaur	95,15	tercapai
2	Bengkulu Utara	90,45	tercapai
3	Kepahiang	84,88	tercapai
4	Bengkulu Selatan	83,37	tercapai
5	Kota Bengkulu	81,68	tercapai
6	Mukomuko	79,42	tercapai
7	Seluma	72,18	Belum
8	Rejang Lebong	63,86	Belum
9	Bengkulu Tengah	60,01	Belum
10	Lebong	44,52	Belum

Capaian Angka Kesiapan Sekolah Provinsi Bengkulu tahun 2023

Masih terdapat kabupaten yang capaian AKS nya masih dibawah target Renstra Kemendikbudristek, yaitu Kabupaten Lebong 44,52%, Bengkulu Tengah 60,01%, Rejang Lebong 63,86% dan Seluma 72,18.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE



Memperhatikan data di atas, maka perlu diadakan upaya peningkatan AKS di empat kabupaten tersebut. Salah satu cara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan AKS adalah dengan melakukan Bimbingan Teknis Pemda Dalam Rangka Ketercapaian Program PAUD dan Wajar 12 Tahun kepada pemangku kepentingan perlunya meningkatkan AKS. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemda Dalam Rangka Ketercapaian Program PAUD dan Wajar 12 Tahun dilaksanakan pada tanggal 8 Juli s.d 10 Juli 2024.

Peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pemda Dalam Rangka Ketercapaian Program PAUD dan Wajar 12 Tahun terdiri dari unsur : Kabid PNF, Kasi PAUD, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Ketua IGTK, Bunda PAUD kecamatan, dan Ketua HIMPAUDI dengan total peserta 71 (tujuh puluh satu) orang.

5. Bimbingan Arkas Kepada Pemerintah Daerah.

Kegiatan Bimbingan Teknis ARKAS kepada Pemerintah Daerah dilakukan pada rentang waktu tanggal 3 s.d. 14 Juni 2024. Kegiatan ini melibatkan Kepala Bidang SMA, Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang SD, Kepala Bidang SMP, Kepala Bidang PAUD dan Kesetaraan, serta Manager Dana BOS.

Sasaran kegiatan ini terdiri dari sembilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, satu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, dan satu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

6. Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK).

Kegiatan dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 17 s.d 19 Mei 2024 (Paket C) dan 24 s.d 26 Mei 2024 (Paket A dan B). Sasaran pemantauan berjumlah 65 PKBM/SKB/SPNF yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dengan jumlah petugas pemantau berjumlah 45 orang petugas BPMP Provinsi Bengkulu dan 10 orang petugas tim teknis Kabupaten/Kota. Kegiatan telah dilaksanakan dengan ketercapaian tujuan 100%.

Kendala / Permasalahan :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kendala pada IKK 1.1 adalah

- a. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Bidang Pendidikan Inklusi di Provinsi Bengkulu (4 – 5 April 2024) terlaksana dengan kehadiran peserta belum sesuai target peserta yakni sebanyak 310 orang. Seluruh materi sesuai dengan struktur program tersampaikan sedang tujuan kegiatan belum sepenuhnya tercapai;
- b. Kendala yang dihadapi pada Sosialisasi Sobat (SIAR) karena pola sosialisasi dalam bentuk zoom, maka pemahaman kurang maksimal sehingga banyak pertanyaan teknis dan non teknis yang disampaikan oleh peserta;
- c. Kendala yang dihadapi saat Advokasi AKS kepada Pemerintah Daerah dengan AKS Rendah antara lain: Sasaran yang strategis tidak dapat diadvokasi secara maksimal karena keterbatasan waktu dan anggaran;
- d. Kendala untuk kegiatan Bimbingan Arkas Kepada Pemerintah Daerah adalah pihak pemangku kepentingan seperti kepala bidang dan kepala dinas sebagian kecil tidak dapat hadir saat FGD karena ada penugasan lain;
- e. Kendala pada saat pelaksanaan uji kesetaraan adalah tidak ada pengawasan silang pada saat pelaksanaan dan satuan pendidikan yang memilih status mandiri namun dalam pelaksanaannya menumpang pada satuan pendidikan lain.

Strategi / Tindak Lanjut :

- a. Rekomendasi hasil berdasarkan Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Bidang Pendidikan Inklusi di Provinsi Bengkulu adalah untuk mendorong Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang sudah dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota/Provinsi;
- b. Strategi yang digunakan untuk memaksimalkan peran Sobat SIAR adalah melakukan pendampingan dalam komunitas, meningkatkan intensitas sobat SIAR dan memberikan ruang publik seluas-luasnya baik melalui media *podcast* dan *talkshow*. Pelibatan sobat SIAR dalam berbagai kesempatan kegiatan di BPMP;
- c. Strategi yang digunakan pada Advokasi AKS kepada Pemerintah Daerah dengan AKS Rendah selain memberikan fasilitasi/pendampingan secara mandiri juga dilakukan pendekatan berbasis kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan organisasi mitra dan Pokja Bunda PAUD;
- d. Setelah dilakukan FGD Bimbingan Arkas Kepada Pemerintah Daerah dengan memaksimalkan advokasi dan pendampingan agar melakukan pemantauan secara intens terhadap *dashboard* serta melakukan pendampingan secara mandiri kepada satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten/kota oleh PIC dan tim;
- e. Terkait pelaksanaan ANBK maka BPMP Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Provinsi untuk pelaksanaan uji kesetaraan tahun berikutnya terkait pengawasan silang. BPMP Provinsi Bengkulu lebih memastikan pemilihan status dan moda serta gelombang dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKK 1.2 adalah

a. Pelaksanaan PMO Level Daerah PSP dan IKM.

Kegiatan Program Manajemen Operasional Program Sekolah Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara daring pada tanggal 29 April 2024. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai dukungan target kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional sepenuhnya dilakukan oleh PSP dan satuan pendidikan IKM. Tujuan kegiatan PMO level daerah adalah untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan PSP dan IKM, menyusun rencana perbaikan terhadap kelemahan implementasi PSP dan IKM di kabupaten/Kota dan Provinsi.

b. Rapat Koordinasi Persiapan Festival Kurikulum Merdeka.

Rapat Koordinasi Persiapan Festival Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara luring pada tanggal 2-3 Juni 2024 di Hotel Santika. Kegiatan koordinasi persiapan FKM dilaksanakan dengan sasaran unsur dari pejabat dinas pendidikan dan satuan pendidikan yang akan mengisi kegiatan FKM. Tujuan rapat koordinasi adalah menyiapkan secara teknis persiapan pelaksanaan FKM yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2024.

c. Advokasi Peningkatan Progres Belajar melalui Pemanfaatan PMM.

Kegiatan Advokasi Peningkatan Kualitas Pemanfaatan PMM dalam Progres Belajar, Pemanfaatan Perangkat Ajar dan Aktivitas Komunitas Belajar yang berfokus pada permasalahan peserta didik dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024 di hotel pada sepuluh kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu. Sasaran kegiatan advokasi sebanyak 600 orang/satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka tahun 2024.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tujuan kegiatan adalah: memberikan pemahaman, mendorong pemanfaatan dan memastikan sekolah pelaksana kurikulum merdeka memanfaatkan platform merdeka mengajar sebagai sarana belajar dan mengajar.

d. Festival Kurikulum Merdeka.

Festival Kurikulum Merdeka Se Provinsi Bengkulu dilaksanakan di Gedung Aula Bencolen BPMP Provinsi Bengkulu Tanggal 25 s.d 27 Juni 2024 dengan sasaran 100 orang, terdiri dari 20 orang perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta 80 orang dari unsur sekolah pelaksana kurikulum merdeka. Pelaksanaan festival kurikulum merdeka dihadiri oleh Kepala Sekolah dan Guru serta Masyarakat dari sekitar/lingkungan BPMP.

e. Workshop Pengimbasan Program Sekolah Penggerak.

Kegiatan workshop pengimbasan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 28 s.d. 30 Juni 2024. Tempat kegiatan dilaksanakan di BPMP Provinsi Bengkulu dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)*. Kegiatan menyangkut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, PMO PSP Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah PSP Angkatan 1, PMO PSP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan internal BPMP. Jumlah sasaran yang hadir 100% (116 orang). Diharapkan PSP Angkatan 1 selesai kegiatan sudah siap untuk mengimbaskan Transformasi Pendidikan ke Sekolah yang telah ditunjuk.

f. Pendampingan Pelaksanaan PPDB dan Advokasi Program Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Kegiatan dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Provinsi pada tanggal 12 s.d 14 Juni 2024. Jumlah sasaran adalah 66 orang seluruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Tim Pendamping sebanyak 22 orang se Provinsi Bengkulu. Mendukung program pelaksanaan PPDB oleh Pemda Daerah secara Objektif, transparan dan akuntabel dan mendukung program guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ketercapaian Kepala Sekolah yang diangkat dari guru penggerak saat ini mencapai 37,3%. Pemda melakukan PPDB sesuai prinsip *objective*, transparan dan akuntabel sebanyak 99,1%. Pemda memiliki satgas PPKSP sebanyak 90,9 %, tersisa hanya Kabupaten Seluma yang belum ada Satgas PPKSP. Ketercapaian satuan pendidikan memiliki Tim TPPK sebanyak 95,96%.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



g. Bimtek PPTK Secara *Online* untuk Pembentukan Satgas dan TPPK di Satuan Pendidikan.

Pelaksanaan pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2024 yang diikuti oleh satuan pendidikan kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu dengan kapasitas 500 satuan pendidikan per hari. Pada saat ini sudah terbentuk sepuluh satuan tugas (satgas) kabupaten/kota se provinsi dari sebelas satgas yang ada.

h. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampus Mengajar.

Tanggal pelaksanaan adalah 20 s.d. 22 Mei 2024, bertempat di Satuan Pendidikan dimana mahasiswa Program Kampus Mengajar melaksanakan penugasan di seluruh Provinsi Bengkulu. Sasaran sebanyak 35 Satuan Pendidikan dan responden semuanya 157 responden. Kehadiran peserta 100% dan ketercapaian tujuan 100%. Hasil positif dinyatakan oleh responden/Kepala Sekolah yang menjadi tempat penugasan peserta.

i. Gebyar Gerakan Sekolah Sehat.

Pada tanggal 28 Mei 2024 di BPMP Provinsi Bengkulu, diikuti peserta sebanyak 120 orang. Kegiatan ini untuk mendukung ketercapaian satuan pendidikan binaan dengan status merah meningkat kategori status kesehatannya menjadi kuning di tahun 2024 atau satuan pendidikan binaan dengan status kuning meningkat kategori status kesehatannya menjadi hijau di tahun 2024.

j. Perencanaan Berbasis Data (PBD) Satuan Pendidikan.

Kegiatan PBD dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Kegiatan dilaksanakan dalam dua angkatan. Angkatan 1: 29 s.d 31 Mei 2024 dan Angkatan 2: 5 s.d. 7 Juni 2024. Lokasi Pelaksanaan: BPMP Provinsi Bengkulu. Jumlah Peserta yang diundang: 240 orang. Jumlah Peserta yang hadir: 238 orang. Kehadiran peserta juga dilengkapi dengan unsur Dinas Pendidikan. Seluruh peserta kegiatan telah membuka rapor pendidikan masing-masing.

k. Perencanaan Berbasis Data (PBD) Rapor Pendidikan Pemerintah Daerah.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Perencanaan Berbasis Data (PBD) Rapor Pendidikan Pemerintah Daerah didukung dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Pendampingan Rakortek Kabupaten/Kota oleh Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) Provinsi tanggal 22 Maret 2024 di Gedung Pola Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu. Kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, Ketua Tim Kerja PDM 04, dan PIC PBD-04B pada saat BAPPEDA Provinsi Bengkulu melakukan e-Rakortek bersama 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Unsur peserta kegiatan ini adalah Bidang Perencanaan Dinas Dikbud dan BAPPEDA di semua kabupaten/kota. Telah dilakukan pendampingan tatap muka terhadap 9 kabupaten/kota, karena Kabupaten Lebong tidak hadir dalam kegiatan yang dimaksud. Kegiatan telah mencapai tujuan, yaitu melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan melalui *tagging* indikator prioritas dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Melalui *tagging* ini, maka program yang akan diusulkan oleh Dinas Dikbud akan sinkron dengan program bidang pendidikan di tingkat nasional.
2. Pendampingan Perencanaan Pemda terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dilakukan melalui keterlibatan BPMP Provinsi Bengkulu dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada rentang waktu Maret hingga April 20024. Tidak semua kabupaten/kota melibatkan BPMP Provinsi Bengkulu dalam kegiatan Musrembang ini. Pendampingan melalui Musrembang dilakukan pada 5 (lima) provinsi/kabupaten/kota, yaitu Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Kaur. Pendampingan juga dilakukan melalui diskusi tatap muka dengan pihak Pemda yang datang ke BPMP Provinsi Bengkulu. Telah hadir beberapa perwakilan Dinas Dikbud dan perwakilan Bappeda kabupaten/kota untuk melakukan diskusi dan koordinasi tentang indikator dan sub-kegiatan prioritas pencapaian SPM. Perwakilan Pemda yang telah hadir di BPMP Provinsi Bengkulu adalah, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lebong. Selain pendampingan melalui keterlibatan pada Musrembang dan diskusi tatap muka, pendampingan juga dilakukan melalui pemantauan dashboard SIPD, koordinasi formal melalui surat, dan koordinasi informal melalui kontak whatsapp.
3. Sosialisasi Surat Mendikbudristek terkait SPM Pendidikan dilakukan melalui fasilitas *zoom-meeting* pada tanggal 5 Maret 2024 di tautan <https://s.id/SosialisasiCapaian> dan Target SPM atau *meeting ID*: 99602829360 *Password*: 388989. Sasaran kegiatan adalah unsur Dinas Dikbud, unsur BAPPEDA, dan unsur Badan Keuangan Daerah/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKD/BPKAD), serta unsur BPMP Provinsi Bengkulu. Tingkat kehadiran peserta undangan relatif tidak memuaskan karena hanya 4 (empat) Dinas Dikbud kabupaten yang hadir atau 45,5%, 4 (empat) perwakilan BAPPEDA yang hadir, dan 1 (satu) perwakilan BKD/BPKAD yang hadir dalam *zoom-meeting*. Walaupun kehadiran peserta relatif rendah, melalui kegiatan ini telah tersampaikan informasi tentang

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



capaian SPM 2023 dan target SPM 2025 berbasis Rapor Pendidikan Pemerintah Daerah sesuai surat Mendikbudristek. Juga telah disampaikan informasi tentang indikator utama dan indikator prioritas yang mempengaruhi pencapaian indeks SPM bidang pendidikan.

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang ditemui pada IKK 1.2 adalah

- a. Kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada PMO Level Daerah PSP dan IKM antara lain kehadiran dari sasaran yang kurang maksimal dan kurangnya kontribusi peserta dalam mengikuti kegiatan PMO;
- b. Pengangkatan Guru Penggerak yang belum diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, terutama Guru Penggerak (GP) menjadi Pengawas Sekolah adalah karena terhambat informasi terkait aturan dan regulasi yang terbaru;
- c. Kendala yang dihadapi pelaksanaan Program Kampus Mengajar monitoring dan evaluasi kampus mengajar angkatan 7 adalah kehadiran Dosen Pendamping Lapangan sangat rendah di satuan pendidikan, DPL lebih banyak hadir memakai *online*, *zoom* dan chat *WA*;
- d. Pada kegiatan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan terdapat beberapa peserta yang ditugaskan tidak sesuai dengan sasaran yang diundang, sasaran yang diundang adalah kepala sekolah atau guru perwakilan komunitas belajar yang aktif, sedangkan yang ditugaskan bukan merupakan perwakilan dari komunitas belajar sehingga materi yang didapatkan selama mengikuti kegiatan tidak dapat diimbaskan;
- e. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan Pendampingan Rakortek Kabupaten/Kota oleh Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (Bappeda) Provinsi adalah:
 1. BPMP Provinsi Bengkulu bukan pelaku utama dari kegiatan ini sehingga hanya sebagai pihak undangan yang sepenuhnya mengikuti rencana kegiatan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu. Hal ini menyebabkan koordinasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum maksimal sementara alokasi waktu yang disediakan untuk berdiskusi dalam rangka pendampingan sangat terbatas;
 2. Tidak semua kabupaten/kota yang menugaskan perwakilan dari Dinas Dikbud, sebagian besar peserta hanya dari unsur Bappeda. Hal ini menyebabkan diskusi tentang sub-kegiatan prioritas menjadi relatif terbatas;

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Semua Dinas Dikbud belum menginput usulan program/kegiatan dalam SIPD, sehingga data dalam aplikasi tersebut belum dapat didisusikan secara mendalam;
4. Kegiatan Musrembang lebih cenderung pada kegiatan seremonial saja. Hal ini menyebabkan rekomendasi yang disampaikan BPMP Provinsi Bengkulu relatif kurang efektif untuk diimplementasikan;
5. Tidak semua Pemda melibatkan BPMP Provinsi Bengkulu, sehingga rekomendasi tidak dapat disampaikan secara merata;
6. Tidak semua Perda melakukan koordinasi tatap muka dengan BPMP Provinsi Bengkulu. Sehingga diskusi tentang program prioritas pemenuhan SPM relatif tidak merata;
7. Kegiatan *zoom meeting* cenderung telah menjadi aktivitas yang tidak menggugah minat peserta. Hal ini menyebabkan tingkat kehadiran sangat rendah dan fokus peserta pada diskusi melalui daring menjadi rendah. Hal ini menyebabkan penyampaian informasi menjadi relatif tidak optimal.

Strategi / Tindak Lanjut :

- a. Melaksanakan pendataan PIC program PSP dan IKM pada tiap kabupaten/kota. Perbaikan juga perlu dilakukan dengan melibatkan Koordinator Fasilitator dari BGP untuk menyampaikan permasalahan yang ditemui oleh fasilitator masing-masing daerah;
- b. Mendorong adanya bimbingan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan PMM melalui komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing sekolah serta dilakukan pengimbangan kepada guru di satuan pendidikan itu sendiri maupun di satuan pendidikan yang berdekatan yang tergabung dalam komunitas belajar. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan PMM di komunitas belajar di satuan pendidikan;
- c. Untuk meningkatkan persepsi orang tua siswa dan masyarakat terhadap kurikulum merdeka perlu direncanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan media komunikasi sebagai sarana sosialisasi implementasi kurikulum merdeka;
- d. Melakukan pendampingan implementasi pendampingan dan visitasi pelaksanaan pendampingan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan PSP angkatan 1;
- e. Berkoordinasi dengan Pusat Karakter terkait pendampingan Bimtek Satuan Tugas dan TPPK;

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- f. Melakukan kolaborasi dengan Ditjen GTK dalam implementasi aturan terbaru pengangkatan Guru Penggerak menjadi Pengawas Sekolah untuk membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal pengangkatan guru penggerak menjadi pengawas sekolah dan kepala sekolah;
- g. Berkoordinasi dengan Penanggungjawab Program Kampus Mengajar terkait penugasan DPL;
- h. Memastikan supaya sekolah binaan melaksanakan tes kebugaran atau asesmen kebugaran sehingga kesehatan siswa dapat terpetakan;
- i. Menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang prioritas kegiatan sehingga diharapkan pihak dinas bisa berkoordinasi dengan satuan pendidikan sasaran peserta yang diundang untuk menugaskan peserta yang sesuai dengan kualifikasi undangan;
- j. Melakukan kegiatan pendampingan pra-rakortek kepada unsur Dinas Dikbud dan Bappeda. Melalui kegiatan pra-rakortek ini, diharapkan semua data SIPD perencanaan pembangunan bidang pendidikan telah tersedia ketika Bappeda Provinsi Bengkulu melakukan kegiatan Rakortek;
- k. Melakukan kegiatan pendampingan perencanaan pemda tatap muka secara formal dengan melibatkan unsur Dinas Dikbud dan Bappeda. Melalui kegiatan pendampingan ini, Dinas Dikbud dan Bappeda memiliki pemahaman dan kepedulian yang lebih baik untuk konsisten berupaya melakukan sinkronisasi program Pemda dengan program kemendikbidristek. Hal ini diperlukan karena tanpa konsistensi ini maka upaya mempertahankan program prioritas hingga tahap penganggaran menjadi relatif tidak optimal;
- l. Sosialisasi surat menteri dilakukan bersamaan dengan kegiatan tatap muka pra-rakortek dan/atau kegiatan pendampingan perencanaan.

3. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu

Progress / Kegiatan :

- 1. Pada Triwulan II ini, BPMP Provinsi Bengkulu telah melakukan kegiatan yaitu :
 - a. Menyusun ulang RKA KL sesuai hasil revisi, melakukan revisi POK, menyusun ulang TOR kegiatan, menyusun Rencana Aksi Kegiatan, melakukan Revisi tingkat satker 4 kali dan Revisi tingkat Unit buka blokir sebanyak 4 kali, melakukan pelaporan kinerja bulanan 3 kali (sebelum tanggal 10 setiap bulan), melakukan pelaporan output bulanan 3 kali (sebelum tanggal 5 setiap bulan);
 - b. Mengikutsertakan lima orang staf BPMP Provinsi Bengkulu pada minggu ke I Bulan Februari Tahun 2024 Pelatihan *Massive Open Online Course (MOOC)* kategori Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Batch 1 yang diselenggarakan oleh LKPP secara online dan mandiri;

Catatan :

- 1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- c. Mengikutsertakan tiga orang staf BPMP Provinsi Bengkulu pada tanggal 12 s.d. 16 Agustus 2024 Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk kategori Sertifikasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
- d. Selama triwulan kedua tahun 2024 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung SAKIP dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui tim publikasi dan komunikasi (PDM 07). Laporan yang merangkum seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Bengkulu selama triwulan kedua tahun 2024, lengkap dengan deskripsi singkat dan *link* asli berita untuk referensi lebih lanjut:

1. Kreativitas dan Kolaborasi dalam CAMKOHA

Tanggal: 15 April 2024

Deskripsi: BPMP Bengkulu menyelenggarakan acara "CAMKOHA" yang menginspirasi dengan tema kreativitas dan kolaborasi. Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk berbagi ide dan praktik terbaik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Link Berita: Kreativitas dan Kolaborasi

2. Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)

Tanggal: 2 Mei 2024

Deskripsi: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, BPMP Bengkulu melanjutkan semangat Merdeka Belajar dengan mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu.

Link Berita: Peringatan Hardiknas

3. Media Training Eksklusif

Tanggal: 8 Mei 2024

Deskripsi: Kepala BPMP Provinsi Bengkulu memberikan wawasan dalam acara "Senin Pagi CAMKOHA" melalui pelatihan media eksklusif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan penggunaan media bagi para Kepala Unit Pelaksana Teknis KEMENDIKBUDRISTEK.

Link Berita: Media Training Eksklusif

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE



4. Implementasi Rencana Kerja Tim RBI

Tanggal: 10 Mei 2024

Deskripsi: Dilakukan monitoring periodik dan evaluasi kinerja serta langkah perbaikan untuk implementasi rencana kerja tim RBI pada awal I tahun 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Link Berita: [Implementasi Rencana Kerja Tim RBI](#)

5. Upaya Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

Tanggal: 15 Mei 2024

Deskripsi: BPMP Provinsi Bengkulu mengundang instansi dan tokoh masyarakat untuk upaya pembangunan ZI-WBK serta mengadakan Halal Bi Halal. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan integritas dalam menciptakan wilayah bebas korupsi di lingkungan pendidikan.

Link Berita: [Upaya Pembangunan ZI-WBK](#)

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang dihadapi BPMP Provinsi Bengkulu dalam mencapai target IKK 2.1 adalah

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Beberapa kegiatan timnya memerlukan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang cukup. Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki keahlian khusus menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan maksimal seperti misalnya belum lengkapnya kriteria/syarat menjadi Pejabat Pengadaan sehingga BPMP memakai tenaga konsultan dari kelompok PBJ.

- b. Koordinasi dan Kolaborasi Antar *Stakeholder*

Koordinasi antara Tim 2 Publikasi dan Komunikasi dengan tim kerja lainnya dan pemangku kepentingan lainnya kadang mengalami hambatan, terutama dalam hal komunikasi dan sinergi pelaksanaan program sehingga terjadi keterlambatan penerbitan berita. Berita yang tersaji dalam laman BPMP atau media sosial tidak *real time*.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE



Strategi / Tindak Lanjut :

Untuk meminimalkan risiko akibat dari kendala yang ada, BPMP Provinsi Bengkulu melakukan :

1. Rapat Koordinasi Rutin: mengadakan rapat koordinasi rutin antar tim kerja untuk membahas rencana program kerja yang akan dilaksanakan di bulan depan;
2. Pelaporan kinerja bulanan sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan output bulanan sebelum tanggal 5 setiap bulan;
3. Penyusunan SOP dan panduan yang jelas mengenai prosedur kolaborasi antar tim kerja untuk menghindari miskomunikasi dan meningkatkan efisiensi pembuatan publikasi kegiatan tiap tim kerja.

4. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu

Progress / Kegiatan :

BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2024 telah melakukan beberapa kegiatan/aktivitas untuk mencapai target ini yaitu :

1. Melakukan revisi POK menyesuaikan dengan hasil pemantauan Setditjen PDM;
2. Melakukan pengajuan UP 2 kali/TUP 3 kali, mengajukan GUP 3 kali, menyampaikan LPJ bendahara penerimaan dan pengeluaran bulanan (sebelum tanggal 10 setiap bulan), menyampaikan laporan pajak (sebelum tanggal 20 setiap bulan), melakukan pembayaran belanja pegawai sebelum tanggal 15 setiap bulan, melakukan reviu nilai IKPA setiap bulan (Juli EKA: 34.67; IKPA : 89.43). Pembayaran bendahara sebanyak 2121 kwitansi dan pembayaran LS sebanyak 114 kali;
3. Menyampaikan laporan keuangan semester I, menyampaikan laporan penerimaan triwulan II, dan menyampaikan laporan PNBP 3 kali;
4. Melakukan estimasi serapan anggaran dengan revisi Hal III DIPA;
5. Melaksanakan pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu;
6. Melaksanakan pelaporan keuangan pada aplikasi SAKTI tepat waktu;
7. Melaksanakan sinkronisasi BMN pada aplikasi SAKTI tepat waktu.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kendala / Permasalahan :

Kendala yang dihadapi BPMP Provinsi Bengkulu dalam mencapai target ini adalah

1. Penanggungjawab kegiatan (PIC) belum semua melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang ada di DIPA serta revisi DIPA;
2. Nilai serapan anggaran yang tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan seringkali lebih lama dari perkiraan semula. Hal ini berimbang pada jadwal penyerapan anggaran juga tertunda. Hal lain yang mempengaruhi kurang optimalnya nilai IKPA adalah realisasi anggaran kadang kala melebihi bulan pelaksanaan kegiatan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Langkah yang dilakukan BPMP Provinsi Bengkulu adalah

1. Tim perencanaan dan PPK melakukan rapat rutin agar persiapan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih singkat;
2. PPK mengingatkan PIC untuk tepat waktu melaksanakan kegiatan melalui ketua tim kerja;
3. Kuasa Pengguna Anggaran meminta operator MS Project melaporkan apabila tenggat waktu kegiatan hampir terlewati.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[419548.DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	2.025	0	2.025	8.069.025.000	804.448.500	7.264.576.500
[419548.DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	2.111	0	2.111	147.520.000	56.324.800	91.195.200
[419548.WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	475.000.000	136.438.220	338.561.780

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE



[419548.WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	17.680.042.000	7.871.739.384	9.808.302.616
[419548.WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	0	1	900.850.000	46.864.000	853.986.000
[419548.WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	304.313.000	0	304.313.000
Total				27.576.750.000	8.915.814.904	18.660.935.096	

D. Rekomendasi Pimpinan

Memperhatikan kendala yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan serta mencermati langkah strategi yang akan ditempuh oleh penanggungjawab kegiatan, maka upaya yang sebaiknya diambil adalah :

1. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang Pendidikan;
2. Menguatkan peran ketua tim kerja untuk mengontrol indikator keberhasilan dari setiap kegiatan;
3. Mendorong peran wali wilayah yang sudah dibentuk agar lebih insentif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota se Provinsi;
4. Berkommunikasi dengan pihak perencanaan dan KPPN terkait revisi DIPA;
5. Menggiatkan adanya bimtek atau *IHT* bagi seluruh staf.

Bengkulu, 07 Agustus 2024

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Widyati Rosita
NIP 196805091993032001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE

